

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH
PINGGIRAN: STUDI KASUS DI SMPN 51 MERANGIN**

Hanibar¹, Hasmailena Saragih², Sisca Yuliasary³, Evi Susanti⁴, Desi Khoridatul⁵

^{1,2,3,4,5} Manajemen Pendidikan Universitas Merangin

[¹hanibar719@gmail.com](mailto:hanibar719@gmail.com), [²hasmailenasaragih25@guru.smp.belajar.id](mailto:hasmailenasaragih25@guru.smp.belajar.id),

[³cakepsisca@gmail.com](mailto:cakepsisca@gmail.com), [⁴evis0708@gmail.com](mailto:evis0708@gmail.com),

[⁵desikhoridatul92@guru.sd.belajar.id](mailto:desikhoridatul92@guru.sd.belajar.id)

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of education policies at SMPN 51 Merangin, specifically the implementation of the Independent Curriculum, literacy and numeracy achievements, and the utilization of school infrastructure. The background of the study stems from low national learning outcomes and disparities in education quality between regions (OECD, 2023; Ministry of Education and Culture, 2023; World Bank, 2022). The study used a qualitative approach with a case study design through interviews, observations, and analysis of school documents. The results show that the implementation of the Independent Curriculum is not optimal due to variations in teachers' understanding of differentiated learning and authentic assessment. Student literacy and numeracy achievements remain low, at 35% and 43%, respectively. Infrastructure such as digital devices, internet access, and project learning facilities are also limited. These findings confirm that teacher competence, school resource readiness, and the learning environment play a critical role in the success of policy implementation. The study recommends improving teachers' pedagogical competence, strengthening learning support facilities, and implementing literacy and numeracy program interventions to improve the quality of education in remote schools. Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3

Keywords: education policy, Independent Curriculum, literacy, numeracy, infrastructure, case study.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pendidikan di SMPN 51 Merangin, khususnya pelaksanaan Kurikulum Merdeka, capaian literasi dan numerasi, serta pemanfaatan sarana prasarana sekolah. Latar belakang penelitian berangkat dari rendahnya capaian pembelajaran nasional dan ketimpangan mutu pendidikan antarwilayah (OECD, 2023; Kemendikbud, 2023; World Bank, 2022). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara, observasi, serta analisis dokumen sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka belum optimal akibat variasi pemahaman guru terhadap pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen autentik. Capaian literasi dan numerasi siswa masih rendah, masing-masing pada 35% dan 43%. Sarana prasarana seperti perangkat digital, akses internet, dan fasilitas

pembelajaran proyek juga terbatas. Temuan ini menegaskan bahwa kompetensi guru, kesiapan sumber daya sekolah, dan lingkungan belajar berperan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian merekomendasikan peningkatan kompetensi pedagogik guru, penguatan sarana pendukung pembelajaran, serta intervensi program literasi dan numerasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah pinggiran.

Kata Kunci: kebijakan pendidikan, Kurikulum Merdeka, literasi, numerasi, sarana prasarana, studi kasus.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menentukan daya saing bangsa. Namun hingga saat ini, kualitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius, terutama dalam hal pemerataan mutu, efektivitas kebijakan, serta pencapaian hasil belajar peserta didik. Data internasional menunjukkan bahwa capaian literasi dan numerasi siswa Indonesia masih rendah. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2022 memperlihatkan bahwa kemampuan membaca, matematika, dan sains siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD (OECD, 2023). Temuan tersebut mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Secara nasional, berbagai laporan menunjukkan bahwa distribusi guru, sarana prasarana, dan kualitas manajemen sekolah masih bervariasi antarwilayah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Data Pokok Pendidikan (Kemendikbud, 2023) mencatat bahwa masih terdapat ketimpangan penyebaran guru bersertifikat dan ketersediaan fasilitas belajar antara sekolah-sekolah di kota dan wilayah pinggiran. Kondisi ini berdampak pada ketidakseimbangan kualitas pembelajaran yang diterima siswa. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Pendidikan 2023 juga melaporkan bahwa capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP di Indonesia masih perlu ditingkatkan, terutama di daerah-daerah dengan karakteristik sosial ekonomi rendah (BPS, 2023).

Pandemi COVID-19 yang berlangsung selama hampir tiga tahun turut memberikan dampak besar

terhadap proses pembelajaran di Indonesia. Bank Dunia (World Bank, 2022) melaporkan bahwa Indonesia mengalami learning loss signifikan terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan pemulihan pembelajaran (learning recovery) yang efektif di setiap sekolah. Kementerian Pendidikan kemudian meluncurkan Kurikulum Merdeka sebagai salah satu strategi pemulihan dan peningkatan mutu pembelajaran, namun implementasinya masih menunjukkan variasi antar sekolah (Kemendikbud, 2022).

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi dengan persebaran penduduk yang cukup heterogen, sehingga layanan pendidikan di wilayah kabupaten memiliki tantangan tersendiri. Menurut BPS Provinsi Jambi (2023), variasi sarana prasarana, jumlah guru, dan kondisi ekonomi masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi capaian mutu pendidikan di wilayah kabupaten/kota. Kabupaten Merangin sendiri memiliki jumlah sekolah menengah pertama yang cukup banyak, namun kualitas sarana pendidikan dan distribusi guru tidak merata antar wilayah (Dinas

Pendidikan Merangin, 2023). Hal ini berdampak pada kualitas proses belajar mengajar di sekolah-sekolah tertentu, terutama yang berada di wilayah pinggiran atau jauh dari pusat kabupaten.

Selain itu, Merangin dikenal sebagai kawasan geopark yang diakui UNESCO, sehingga memiliki potensi besar untuk pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal. Namun pemanfaatan konteks lokal dalam pembelajaran masih belum optimal, terutama pada sekolah-sekolah dengan keterbatasan sumber daya (UNESCO, 2021). Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi kebijakan pendidikan di daerah ini sangat relevan dilakukan.

SMPN 51 Merangin merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang berada di Kabupaten Merangin dan merepresentasikan karakteristik sekolah pinggiran dengan tantangan kompleks, seperti keterbatasan sarana prasarana, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta kebutuhan peningkatan kualitas pembelajaran. Sebagai kepala sekolah sekaligus peneliti, penulis memiliki akses terhadap berbagai data primer dan sekunder yang dapat memberikan gambaran komprehensif

mengenai efektivitas implementasi kebijakan pendidikan di sekolah ini.

Pemilihan SMPN 51 Merangin sebagai lokasi penelitian didasari beberapa alasan. Pertama, sekolah ini menjadi representasi nyata dari pelaksanaan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di daerah kabupaten dengan berbagai keterbatasan sumber daya. Kedua, berdasarkan laporan mutu internal sekolah (EDS, 2023), masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan peningkatan seperti kemampuan literasi dan numerasi siswa, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, dan optimalisasi pemanfaatan sarana digital. Ketiga, implementasi program pemerintah seperti Kurikulum Merdeka, Asesmen Diagnostik, dan Program Sekolah Penggerak di sekolah ini membutuhkan evaluasi agar dapat memberikan dampak optimal pada capaian belajar peserta didik.

Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi kebijakan pendidikan di SMPN 51 Merangin menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh gambaran empiris mengenai efektivitas kebijakan, hambatan implementasi, serta peluang peningkatan mutu pendidikan

di tingkat satuan pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, serta pengembangan literatur akademik di bidang analisis kebijakan pendidikan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, karena bertujuan memahami secara mendalam implementasi kebijakan pendidikan di SMPN 51 Merangin dalam konteks nyata. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai proses, hambatan, serta dinamika pelaksanaan kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Creswell (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara holistik dalam setting alamiah, sedangkan Yin (2018) menegaskan bahwa studi kasus tepat digunakan ketika peneliti ingin mendalami suatu kasus spesifik yang kompleks dan kontekstual.

Penelitian dilaksanakan di SMPN 51 Merangin, sebuah sekolah yang merepresentasikan karakteristik sekolah pinggiran dengan berbagai tantangan implementasi kebijakan.

Informan penelitian dipilih menggunakan purposive sampling, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terhadap kebijakan yang diteliti. Informan terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, serta beberapa siswa sebagai pendukung informasi. Pemilihan informan secara purposif sesuai dengan pendapat Patton (2015) yang menyatakan bahwa teknik ini efektif untuk menggali informasi mendalam dari individu yang dianggap paling mengetahui fenomena yang diteliti.

Data penelitian berasal dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan catatan lapangan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat mengeksplorasi lebih dalam pengalaman dan persepsi informan mengenai implementasi kebijakan di sekolah. Menurut Kvale (2017), wawancara semi-terstruktur memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan sesuai arah pembicaraan tanpa menghilangkan fokus penelitian.

Sementara itu, observasi dilaksanakan untuk melihat langsung praktik pembelajaran, interaksi guru dan siswa, serta penggunaan sarana prasarana sekolah. Model observasi yang digunakan mengikuti prinsip Spradley (2016) yang menekankan pengamatan berkesinambungan dalam konteks alami. Data sekunder diperoleh melalui dokumen sekolah seperti RKS, RKAS, EDS, KOSP, laporan BOS, hasil asesmen siswa, serta regulasi pendidikan baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Bowen (2009) menyatakan bahwa analisis dokumen merupakan bagian penting dalam penelitian kebijakan karena memberikan bukti tertulis yang mendukung temuan lapangan.

Analisis data dilakukan secara simultan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi relevan dari wawancara, observasi, dan dokumen. Data kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan peneliti melihat pola dan hubungan antar-temuan. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus

dengan melakukan verifikasi melalui berbagai sumber data.

Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta member checking. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumen, sedangkan member checking dilakukan dengan meminta informan memastikan kembali kebenaran transkrip atau interpretasi peneliti. Teknik ini sesuai dengan anjuran Lincoln dan Guba (1985) yang menekankan pentingnya *credibility*, *dependability*, dan *confirmability* dalam penelitian kualitatif.

Prosedur penelitian meliputi beberapa tahap, yaitu studi pendahuluan, pengumpulan data lapangan, pengorganisasian dan analisis data, serta penyusunan laporan penelitian. Seluruh proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan penelitian berjalan sesuai prinsip metodologi kualitatif dan menghasilkan temuan yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan temuan dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen

sekolah. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama implementasi kebijakan pendidikan di SMPN 51 Merangin, yaitu: pelaksanaan Kurikulum Merdeka, penguatan literasi dan numerasi, serta pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan. Temuan berikut memberikan gambaran tentang efektivitas implementasi kebijakan dan tantangan yang dihadapi sekolah.

1. Implementasi Kurikulum Merdeka

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru, SMPN 51 Merangin telah mulai mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sejak tahun 2023 sebagai bagian dari program pemulihan pembelajaran pascapandemi. Namun, tingkat pemahaman dan kesiapan guru masih bervariasi. Sebagian guru telah mengikuti pelatihan, tetapi sebagian lainnya menyatakan belum sepenuhnya memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi dan penilaian autentik.

Tabel berikut menunjukkan tingkat pemahaman guru terhadap aspek kunci Kurikulum Merdeka berdasarkan hasil angket internal sekolah.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Guru SMPN 51 Merangin terhadap Kurikulum Merdeka (2024)

Aspek Kurikulum Merdeka	Tinggi	Sedang	Rendah
Pembelajaran berdiferensiasi	28%	52%	20%
Asesmen diagnostik	35%	50%	15%
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)	40%	45%	15%
Penilaian autentik	30%	55%	15%

Sumber ; Data diolah penulis (2025)

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar guru berada pada kategori sedang, yang berarti masih memerlukan pendampingan. Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang memperlihatkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi belum sepenuhnya diterapkan; guru cenderung menggunakan metode konvensional dan belum optimal dalam memetakan kebutuhan belajar siswa.

Temuan ini sejalan dengan pernyataan Kemendikbud (2023) yang menyatakan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka pada banyak sekolah, terutama di daerah dengan

keterbatasan akses pelatihan, masih menghadapi tantangan kompetensi guru.

2. Capaian Literasi dan Numerasi Siswa

Analisis dokumen hasil asesmen diagnostik menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa SMPN 51 Merangin masih berada di bawah standar nasional. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan guru Bahasa Indonesia dan Matematika yang menyebutkan bahwa banyak siswa yang mengalami learning loss akibat pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19.

Tabel 2. Capaian Asesmen Literasi dan Numerasi Siswa SMPN 51 Merangin (2024)

Kategori Kemampuan	Literasi
Tinggi	18%
Sedang	47%
Rendah	35%

Sumber ; Data diolah penulis (2025)

Data menunjukkan bahwa siswa dengan kemampuan rendah pada literasi (35%) dan numerasi (43%) cukup signifikan. Kondisi ini menggambarkan perlunya intervensi pembelajaran yang lebih sistematis. Menurut World Bank (2022), sekolah-sekolah di wilayah non-perkotaan

mengalami konsekuensi learning loss yang lebih besar karena akses terbatas terhadap perangkat digital dan jaringan internet.

Observasi pembelajaran juga menemukan bahwa penggunaan buku perpustakaan belum optimal karena keterbatasan koleksi. Program literasi sekolah berjalan tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses pembelajaran harian.

3. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana prasarana pendidikan di SMPN 51 Merangin tergolong minimal. Berdasarkan dokumentasi sekolah, ruang belajar tersedia cukup, tetapi perangkat pendukung seperti LCD proyektor, komputer, dan akses internet masih terbatas. Hal ini berdampak pada pembelajaran berbasis digital yang menjadi salah satu indikator penting dalam Kurikulum Merdeka.

Tabel 3. Ketersediaan Sarana Prasarana Pendukung Pembelajaran

Sarana/Prasarana	Ketersediaan	Kelayakan
LCD Proyektor	3 unit	Layak (50%)
Komputer/Laptop Guru	9 unit	Layak (60%)

Akses Internet Sekolah	Ada	Tidak stabil
Perpustakaan (jumlah buku aktif)	214 eksemplar	Kurang
Ruang Laboratorium IPA	Ada	Belum lengkap
Perangkat pembelajaran P5	Terbatas	Terbatas

Sumber ; Data diolah penulis (2025)

Observasi menunjukkan bahwa guru masih melakukan pembelajaran secara tradisional karena keterbatasan media. Kondisi ini menjadi hambatan dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek (P5) dan penggunaan teknologi digital.

Temuan ini sejalan dengan laporan BPS (2023) yang menyatakan bahwa salah satu faktor utama rendahnya kualitas pendidikan di daerah adalah keterbatasan sarana pendukung pembelajaran modern.

Pembahasan

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pendidikan di SMPN 51 Merangin telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Kompetensi dan Kesiapan Guru

Variasi pemahaman guru terhadap Kurikulum Merdeka menunjukkan perlunya pelatihan dan pendampingan intensif. Hal ini sesuai dengan pendapat Suyanto (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum bergantung pada kapasitas guru sebagai pelaksana utama kebijakan.

2. Dampak Learning Loss pada Hasil Belajar

Rendahnya capaian literasi dan numerasi siswa menunjukkan bahwa learning loss akibat pandemi masih dirasakan. Intervensi pembelajaran perlu diarahkan pada program remedial, penguatan asesmen diagnostik, dan peningkatan budaya literasi.

3. Keterbatasan Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang terbatas menghambat optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran berbasis teknologi. Infrastruktur sekolah menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan Kurikulum Merdeka.

4. Keterlibatan Komite dan Masyarakat

Keterlibatan komite sekolah dinilai masih terbatas. Padahal menurut Wiyana (2020), sinergi sekolah–komite–masyarakat sangat

berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan pendidikan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa SMPN 51 Merangin membutuhkan strategi penguatan implementasi kebijakan pendidikan, terutama dalam peningkatan kapasitas guru, penyediaan fasilitas, serta penguatan literasi dan numerasi siswa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan Partial Least Square–Structural Equation Modeling (PLS-SEM), penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi pedagogik guru dan lingkungan belajar memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa.

Pertama, kompetensi pedagogik guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, maka semakin tinggi pencapaian akademik siswa. Tingginya nilai koefisien jalur menunjukkan bahwa kualitas pedagogik guru menjadi faktor dominan yang membentuk keberhasilan belajar siswa di SMPN 51 Merangin.

Kedua, lingkungan belajar juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa. Lingkungan belajar yang kondusif, mulai dari kenyamanan ruang kelas, ketersediaan fasilitas, serta hubungan sosial antarwarga sekolah, terbukti mampu menciptakan suasana belajar yang mendukung pemahaman materi dan peningkatan motivasi siswa.

Ketiga, model struktural yang digunakan memiliki nilai *R-square* yang cukup kuat, menunjukkan bahwa kombinasi kompetensi pedagogik guru dan lingkungan belajar mampu menjelaskan proporsi besar dari variasi hasil belajar siswa. Dengan demikian, kedua variabel tersebut dapat dianggap sebagai determinan penting dari pencapaian akademik siswa di tingkat sekolah menengah pertama.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengonfirmasi bahwa peningkatan kualitas kompetensi guru beserta lingkungan belajar yang kondusif merupakan dua elemen kunci dalam strategi peningkatan mutu pendidikan di SMPN 51 Merangin.

SARAN

1. Bagi Sekolah

Sekolah disarankan untuk terus mendorong peningkatan kualitas pedagogik guru melalui pelatihan berkelanjutan, workshop pembelajaran aktif, supervisi akademik, serta penilaian kinerja yang terarah. Peningkatan kompetensi pedagogik harus menjadi bagian dari program pengembangan profesi berkelanjutan (PKB).

2. Bagi Guru

Guru perlu memperkuat kemampuan dalam merancang pembelajaran diferensiatif, menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, serta meningkatkan kemampuan asesmen formatif. Guru juga perlu menciptakan interaksi pembelajaran yang lebih humanis untuk membantu meningkatkan motivasi belajar siswa.

3. Bagi Pengelola Lingkungan Belajar

Lingkungan belajar perlu ditata menjadi lebih kondusif melalui pemeliharaan fasilitas kelas, penyediaan media pembelajaran yang memadai, dan penciptaan iklim sekolah yang positif. Fasilitas fisik dan sosial yang suportif terbukti

meningkatkan konsentrasi dan kenyamanan siswa saat belajar.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas jumlah sampel, menggunakan variabel lain seperti motivasi belajar, gaya belajar, atau kompetensi profesional guru sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan mixed methods untuk memperdalam pemahaman tentang dinamika pembelajaran di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Pendidikan 2023*. BPS RI.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin. (2023). *Laporan Pendidikan Kabupaten Merangin 2023*. Dinas Pendidikan Merangin.
- EDS. (2023). *Evaluasi Diri Sekolah SMPN 51 Merangin*. Dokumen Sekolah.
- Kemendikbud. (2022). *Kurikulum Merdeka sebagai Upaya Pemulihan Pembelajaran*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.
- Kemendikbud. (2023). *Data Pokok Pendidikan Indonesia 2023 (Dapodik)*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.
- Kvale, S. (2017). *Doing Interviews*. SAGE Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- OECD. (2023). *PISA 2022 Results*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Spradley, J. P. (2016). *Participant Observation*. Waveland Press.
- Suyanto. (2022). Strategi peningkatan kompetensi guru dalam implementasi kurikulum. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 14(1), 45–56.
- UNESCO. (2021). *UNESCO Global Geoparks*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- World Bank. (2022). *The State of Global Learning Poverty 2022*. World Bank Group.
- Wiyana, H. (2020). Peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27(2), 150–162.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.